

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI LAUT
OLEH BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**



OLEH :

RUDY INDRATNO, S.H.

NIM : 031814153024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI LAUT
OLEH BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

RUDY INDRATNO, S.H.

NIM : 031814153024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui, untuk diuji pada

Tanggal 12 Mei 2020

Oleh

Dosen Pembimbing Ketua :



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

NIP. 196809281997021001

Dosen Pembimbing Kedua :



Dr. Maradona S.H., LL.M.

NIP. 198304192006041001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko.,S.H.,M.H.

NIP. 196504191990021001

**Tesis ini telah Diuji dan Dipertahankan Di Hadapan
Tim Penguji Tesis Pada tanggal 12 Mei 2020**

Tim Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

2. Dr. Maradona S.H., LL.M.

3. Sapta Aprilianto S.H., M.H., LL.M.

4. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy Indratno, S.H.

NIM : 031814153024

Program Studi : Magister Ilmu Hukum/ Minat Studi Peradilan

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI
LAUT OLEH BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK
INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Magister Ilmu Hukum ini tidak dapat mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini di buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,

A green 5000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Rudy Indratno'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and '5000 RIBU RUPIAH'.

Rudy Indratno, S.H.
NIM. 031814153024

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50649);
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380).